



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUKTAMAR**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **525108**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.486.500.000

1. Tanah Seluas 776 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 582.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
3. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
4. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
5. Tanah Seluas 169 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
6. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
7. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 328.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 69.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 139.744.504



F. HARTA LAINNYA	Rp.	76.500.000
Sub Total	Rp.	2.100.094.504
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.100.094.504

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.